

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan: Implikasi dan Tantangan dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia

*Muhammad Khatibul Umam, Muhammad Hassan Marzuki, Muhammad Haykal
Tamami, Muhammad Jumhari Ramadhan.
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami Banjarmasin.

Abstract

Received: December 1, 2024
Revised: December 15, 2024
Accepted: January 3, 2025

This article discusses regional autonomy and educational decentralization in Indonesia as part of the government system reform that began in 2001. With the implementation of Law No. 22 and 25 of 1999, the authority over education management shifted from the central government to regional governments. This research analyzes the principles of educational decentralization, its implications for school effectiveness, and the challenges that arise in its implementation. The study's findings indicate that while educational decentralization has the potential to enhance the efficiency and relevance of local education policies, challenges in funding, accountability, and the readiness of regional governments remain the main obstacles. This article recommends improving the managerial capacity of regional governments and increasing the involvement of the private sector and the community in supporting quality education.

Keywords:

Regional autonomy, educational decentralization, school effectiveness.

Abstract

Received: December 1, 2024
Revised: December 15, 2024
Accepted: January 3, 2025

Artikel ini membahas otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi sistem pemerintahan yang dimulai pada tahun 2001. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan berpindah dari pusat ke daerah. Penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip desentralisasi pendidikan, implikasinya terhadap efektivitas sekolah, serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi pendidikan berpotensi meningkatkan efisiensi dan relevansi kebijakan pendidikan lokal, tantangan dalam aspek pendanaan, akuntabilitas, dan kesiapan pemerintah daerah masih menjadi kendala utama. Artikel ini merekomendasikan peningkatan kapasitas manajerial pemerintah daerah serta peningkatan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung pendidikan yang berkualitas.

Keywords:

(*) Corresponding Author:

khatibulumam43@gmail.com

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam konteks pendidikan, desentralisasi berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem pendidikan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Sofiani et al., 2024).



Islamic Knowledge and Pedagogical Perspectives

Volume 1 Number 1 Januari (2025), ISSN: XXXX-XXXX

Implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal melalui pelibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Santina, 2024). Namun, dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan menghadapi berbagai tantangan, seperti disparitas sumber daya antar daerah, kapasitas manajerial yang beragam, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Harahap, 2016).

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara komprehensif implementasi otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan di Indonesia, guna mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

LITERATUR REVIEW

A. Pendahuluan

Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Implementasi kebijakan ini di Indonesia telah berlangsung sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, serta diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Rusdiana & Kodir, 2013). Namun, desentralisasi pendidikan membawa tantangan tersendiri, termasuk dalam aspek pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, serta akuntabilitas pengelolaan pendidikan di daerah.

B. Prinsip-Prinsip Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu desentralisasi administratif dan desentralisasi sekolah. Desentralisasi administratif melibatkan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal kebijakan pendidikan, sedangkan desentralisasi sekolah memberikan keleluasaan kepada institusi pendidikan dalam mengelola kurikulum dan sumber

daya (Rusdiana & Kodir, 2013). Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal.

C. Implikasi Otonomi Daerah terhadap Desentralisasi Pendidikan

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa alokasi anggaran dan kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan (Rusdiana & Kodir, 2013). Beberapa daerah yang memiliki sumber daya melimpah mampu mengembangkan pendidikan dengan lebih baik, sedangkan daerah dengan keterbatasan finansial mengalami kesulitan dalam memenuhi standar nasional pendidikan.

D. Tantangan dalam Implementasi Desentralisasi Pendidikan

Salah satu tantangan terbesar dalam desentralisasi pendidikan adalah perbedaan kapasitas manajerial antar daerah. Banyak daerah yang belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola pendidikan secara mandiri (Rusdiana & Kodir, 2013). Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah tetap selaras dengan standar nasional pendidikan.

E. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendidikan

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam desentralisasi pendidikan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan transparan (Rusdiana & Kodir, 2013). Tanpa adanya sistem akuntabilitas yang kuat, risiko penyalahgunaan dana dan ketimpangan dalam pengelolaan pendidikan akan semakin meningkat.

F. Peran Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pendidikan

Selain pemerintah, partisipasi masyarakat dan sektor swasta juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era desentralisasi (Rusdiana & Kodir, 2013). Banyak sekolah mulai mengadopsi sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memungkinkan keterlibatan lebih besar dari masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan.

G. Desentralisasi Kurikulum dan Metode Pembelajaran

Dengan adanya desentralisasi, sekolah memiliki kebebasan lebih dalam menentukan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, tantangan dalam pengembangan kurikulum masih menjadi kendala utama karena keterbatasan tenaga ahli dan infrastruktur pendidikan di beberapa daerah (Rusdiana & Kodir, 2013).

H. Disparitas Kualitas Pendidikan Antar Daerah

Implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya disparitas kualitas pendidikan antar daerah. Daerah dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah dengan keterbatasan anggaran (Rusdiana & Kodir, 2013). Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas.

I. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan

Untuk mengatasi tantangan dalam desentralisasi pendidikan, beberapa strategi dapat diterapkan, seperti peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan sistem akuntabilitas, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata di seluruh daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong partisipasi masyarakat, desentralisasi pendidikan dapat menjadi solusi efektif dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas (Rusdiana & Kodir, 2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis teori, penerapan, serta tantangan dalam otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan berdasarkan kajian literatur. Metode ini dilakukan dengan menghimpun, mengkaji, serta menganalisis berbagai referensi yang relevan, terutama buku Kapita Selekta Pendidikan Islam: Buku Daras, yang

menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Sumber primer yang digunakan adalah buku Kapita Selekta Pendidikan Islam: Buku Daras, yang mengulas berbagai aspek pendidikan Islam, termasuk kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kajian Literatur

Menelaah secara mendalam bab yang relevan dalam buku Kapita Selekta Pendidikan Islam Buku Daras, terutama Bab 5 yang membahas Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan.

2. Penelusuran Referensi Tambahan

Mengumpulkan dan mengkaji jurnal akademik serta regulasi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan.

3. Analisis Komparatif

Membandingkan teori dan konsep dalam sumber utama dengan penelitian lain yang relevan guna memperoleh wawasan yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Otonomi Daerah dalam Pendidikan

Otonomi daerah dalam sektor pendidikan di Indonesia mengacu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pendidikan. Implementasi ini dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan relevansi kebijakan pendidikan dengan kondisi lokal. Namun, studi menunjukkan bahwa belum semua daerah mampu mengoptimalkan otonomi ini secara efektif akibat keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.

B. Tantangan dalam Desentralisasi Pendidikan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi desentralisasi pendidikan adalah ketimpangan kapasitas antar daerah. Daerah dengan sumber daya finansial yang kuat cenderung memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah dengan keterbatasan anggaran. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi kendala, terutama dalam hal standar pendidikan dan pengelolaan tenaga pendidik. (Usman, 2001)

C. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendidikan

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi aspek krusial dalam desentralisasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki sistem akuntabilitas yang kuat, sehingga sering terjadi inefisiensi dalam alokasi anggaran. Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas desentralisasi.

D. Pengelolaan Kurikulum dan Kualitas Guru

Desentralisasi pendidikan memungkinkan daerah untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, banyak daerah menghadapi kendala dalam penyusunan kurikulum akibat kurangnya tenaga ahli di bidang pendidikan. Selain itu, kualitas guru di berbagai daerah masih bervariasi, sehingga diperlukan pelatihan dan pengembangan profesional yang lebih merata.

E. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Salah satu aspek penting dalam desentralisasi pendidikan adalah partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya otonomi daerah, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan. Namun, tingkat keterlibatan masyarakat masih beragam, tergantung pada sosialisasi dan pemahaman mengenai peran mereka dalam sistem pendidikan.

F. Implikasi terhadap Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan pendidikan antar daerah semakin nyata dengan adanya desentralisasi. Daerah dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki fasilitas

pendidikan yang lebih baik, sementara daerah dengan keterbatasan anggaran mengalami kesulitan dalam memenuhi standar pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang dapat membantu daerah tertinggal dalam meningkatkan kualitas pendidikan mereka. (Madani, 2019)

G. Strategi Peningkatan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan

Untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi pendidikan, beberapa strategi dapat diterapkan, antara lain:

1. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah, melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi para pemangku kebijakan pendidikan di daerah.
2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat dalam penggunaan dana pendidikan.
3. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat, meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung pendidikan di daerah.
4. Pengembangan Kualitas Guru dan Kurikulum Memastikan bahwa setiap daerah memiliki tenaga pendidik yang berkualitas serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Tabel Tantangan dan Solusi dalam Desentralisasi Pendidikan

No	Tantangan	Solusi
1	Ketimpangan kapasitas antar daerah	Penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendampingan teknis
2	Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah	Meningkatkan komunikasi dan integrasi kebijakan antara pusat dan daerah
3	Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan	Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel

Islamic Knowledge and Pedagogical Perspectives
Volume 1 Number 1 Januari (2025), ISSN: XXXX-XXXX

4	Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah	Kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal serta peningkatan investasi dalam infrastruktur pendidikan
5	Partisipasi masyarakat yang masih rendah	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan, khususnya dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Melalui penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih luas dalam mengelola pendidikan, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Namun, implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. salah satu hambatan utama adalah ketimpangan kapasitas manajerial dan sumber daya antar daerah. Wilayah dengan dukungan finansial yang lebih kuat cenderung memiliki sistem pendidikan yang lebih baik, sedangkan daerah dengan keterbatasan anggaran kerap mengalami kesulitan dalam mencapai standar pendidikan nasional. Selain itu, aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan masih menjadi tantangan serius. Tanpa adanya sistem pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan anggaran dan ketidakefisienan dalam alokasinya tetap tinggi. Selain itu, desentralisasi juga menimbulkan tantangan dalam pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Meskipun kebijakan ini memberikan kebebasan bagi daerah dalam menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal, banyak daerah masih menghadapi kendala dalam menyusun kurikulum yang efektif akibat keterbatasan tenaga ahli dan sarana pendidikan. Kesenjangan kualitas guru di berbagai daerah juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan..

Bibliography

- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59>
- Harahap, E. K. (2016). Manajemen otonomi pendidikan di Indonesia. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 1(02), 137–151.
- Ishak, D. (2022). TINJAUAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.497>
- Madani, R. A. (2019). Analysis of educational quality, a goal of education for all policy. *Higher Education Studies*, 9(1), 100–109.
- Rusdiana, A., & Kodir, A. (2013). *Kapita Selekta Pendidikan Islam: Buku Daras*. Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/32364/1/02-BUKU%20AJAR%20Kapita%20Selekta%202013.pdf>
- Santina, R. (2024). PENGARUH DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 9496–9502. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31301>
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(1). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/5273>
- Usman, H. (2001). Peran Baru Administrasi Pendidikan: Dari Sistem Sentralistik Menuju Sistem Desentralistik. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 8(1), 106260.